



KONSTELASI GEOPOLITIK TIONGKOK DI LAUT CHINA SELATAN: STUDI KASUS REKLAMASI DAN MILITERISASI PULAU BUATAN OLEH TIONGKOK DI KEPULAUAN SPRATLY

Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan¹

Nabilla Kharisma Ardhaneswari²

Abstrak:

Penelitian ini menjelaskan mengenai apa tujuan Tiongkok melakukan reklamasi pulau buatan di Kepulauan Spratly beserta dengan militerisasinya. Klaim Tiongkok di Laut China Selatan sudah terjadi sejak betahun-tahun lalu, klaim ini dilakukan Tiongkok berdasarkan klaim sejarahnya. Salah satu upaya untuk menegaskan klaimnya adalah melakukan reklamasi pulau di Kepulauan Spratly dan memiliterisasi pulau-pulau tersebut. Pada tahun 2022, tiga dari tujuh pulau yang berhasil direklamasi sudah dilengkapi fasilitas militer. Pada Penelitian ini, penulis menggunakan Teori Sea Control atau Kontrol Laut untuk melihat isu ini. Selain itu, Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data studi Pustaka berupa sumber data sekunder seperti artikel jurnal,, artikel website, laporan, dll. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa aktivitas militer yang dilakukan oleh Tiongkok di pulau-pulau buatan tersebut didukung oleh People Liberation Army dan Milisi Maritim. Selain itu penulis juga menemukan alasan geopolitik dibalik reklamasi pulau buatan tersebut. Kebaruan dari penelitian ini adalah pembahasan dari segi geopolitik yang menjelaskan strategi Tiongkok dalam reklamasi pulau buatan ini.

Kata Kunci: *Tiongkok, Laut China Selatan, Reklamasi Pulau, Kepulauan Spratly, Sea Control.*

¹Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan
Universitas Satya Negara Indonesia
e-mail : zrlzheryl03@gmail.com

²Nabilla Kharisma Ardhaneswari
Universitas Satya Negara Indonesia
e-mail : Nabillaardhaneswari123@gmail.com

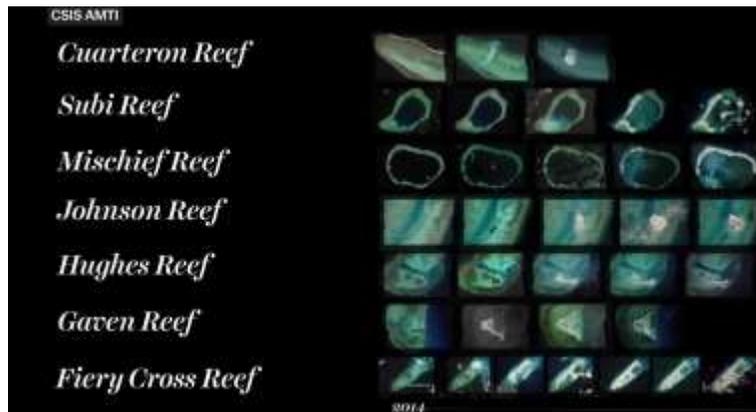
Pendahuluan

Klaim awal Tiongkok atas Laut China Selatan adalah klaim Kepulauan Spratly dan Paracel. Tiongkok mengklaim bahwa mereka telah menjelajahi kepulauan itu sejak tahun 200 SM atau pada abad ke-15, bahkan mereka juga mengatakan bahwa terdapat pemukiman kuno dan penemuan yang menunjukkan kepada kepemilikan dinasti-dinasti Tiongkok sebelumnya. Selain itu, Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan Spratly dan Paracel telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak zaman Dinasti Han, Yuan, dan Ming. Tiongkok juga mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas Laut China Selatan berdasarkan praktik sejarah. Klaim sejarah itu mereka implementasikan melalui pembuatan peta imajiner nine dash line atau sembilan garis putus putus yang dikeluarkan pada tahun 1947 (Darmawan, 2024)

Tiongkok mengklaim Laut China Selatan, yang mana hal ini telah meningkatkan konflik di wilayah tersebut. Laut China selatan sendiri termasuk bagian dari Samudra Pasifik, yang mencakup sebagian dari Singapura dan Area Selat Malaka. Dari perspektif geografis, Laut China Selatan berada di utara negara-negara Asia Tenggara dan di selatan Republik Rakyat Tiongkok. Perairan ini menghubungkan Asia Timur dan Asia Tenggara, yang menjadikannya strategis dari sisi geografis dan menjadikannya jalur pelayaran dunia, 30 persen pelayaran dunia melewati Laut China Selatan. Selain itu, wilayah perairan ini memiliki banyak sumber daya alam (SDA) berupa 3,6 miliar barel cadangan minyak bumi 40,3 triliun kaki kubik cadangan gas alam (EIA, 2024). Untuk memperkuat klaimnya tersebut bahkan Tiongkok juga melakukan proses reklamasi lahan di perairan tersebut khususnya di kepulauan Spratly. Reklamasi sendiri merupakan proses membangun atau mengembalikan area laut yang tidak berpenghuni atau tidak berpenduduk,

biasanya dengan menimbun bahan seperti pasir, batu, atau bahan lainnya, untuk membuat area yang dapat dihuni atau digunakan secara ekonomis (Pramadiansyah, 2022)

Tiongkok membangun pulau-pulau buatan dengan luas total hampir 3.000 hektar di tujuh terumbu karang yang ditempatinya di Kepulauan Spratly di bagian selatan Laut China Selatan. Pembangunan itu dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016. Sejak awal reklamasi hingga sekarang, sudah terdapat 7 pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan. Tujuh diantaranya adalah Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef, dan Subi Reef. Pembangunan tersebut jelas merubah kondisi fisik Laut China Selatan. Dalam reklamasi pulau tersebut, Tiongkok memberikan pesan mengenai keseriusannya atas klaim Laut China Selatan, yang mana klaim tersebut juga akan merubah status quo dari peran Tiongkok di kawasan Laut China Selatan khususnya di kepulauan Spratly. (Beckman, 2017)



Dari tujuh pulau buatan yang dibangun Tiongkok pada saat ini, tiga sudah memiliki fasilitas militer. Tujuan militerisasi ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kontrolnya untuk melakukan pertahanan di Laut China Selatan. Menurut Laksamana John C Aquilino, Komandan Armada Militer AS di wilayah Indo-Pasifik, tiga pulau tersebut adalah Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef. Menurut Aquilino dikutip dari Guardian pada tahun 2022, Tiongkok memperlengkapi tiga pulau reklamasi dengan senjata seperti sistem rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser, dan jamming, serta beberapa jet tempur. Menurut laporan, pulau-pulau tersebut dapat diamati dari udara, dengan beberapa lokasi terlihat seperti kota kecil. Selain itu, dapat juga terlihat hanggar, pelabuhan laut, landasan pacu, gedung bertingkat, gudang, dan bundaran putih dari kaca pesawat. Selain itu, lebih dari 40 kapal terlihat berlabuh di dekat pulau Fiery Cross Reef yang masih berada di Kepulauan Spratly (CNN, 2022; Pramadiansyah, 2022; The Guardian, 2022)

Dengan fasilitas militer yang kompleks dan lengkap di ketiga pulau tersebut, Tiongkok juga memperkuat pertahanannya melalui aktivitas militer yang didukung oleh People Liberation Army dan Milisi Maritim. People Liberation Army juga memainkan peran penting dalam klaim di LCS. PLA disini terdiri dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN), adalah yang paling bertanggung jawab atas militerisasi ini dengan memberikan dukungan dalam berbagai cara kepada kegiatan organisasi lain di LCS. PLAN telah membentuk "lobi Angkatan Laut" untuk mendorong kebijakan maritim yang lebih proaktif dan sering kali sangat efektif dalam membangun terkoordinasi. Sebagai pemain birokrasi yang efektif di seluruh negeri, PLAN memiliki pengaruh yang

signifikan, jika tidak disebutkan secara pasti, dalam pembuatan kebijakan (Yamaguchi, 2016).

Militerisasi pulau buatan Tiongkok di kepulauan Spratly ini kemudian menjadi ancaman geopolitik khususnya pada konteks maritim. Bagi AS, aktivitas Tiongkok ini melanggar dan mengancam kebebasan navigasi yang dipercayai oleh AS atas Laut China Selatan. AS juga menyampaikan kekhawatiran tentang ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh militerisasi pulau-pulau yang dikendalikan oleh Tiongkok di wilayah perairan yang dipersengketakan. Dengan adanya militerisasi di pulau-pulau tersebut, Setiap pesawat militer dan sipil yang terbang di atas perairan yang dipersengketakan bisa dengan mudah berada dalam jangkauan sistem misil yang ditempatkan di pulau-pulau tersebut. Hal ini menunjukkan potensi bahaya bagi penerbangan di daerah tersebut (The Guardian, 2022) Sementara menurut ASEAN, aktivitas Tiongkok ini juga membawa ancaman kawasan lebih lanjut, dan konflik berkepanjangan dengan negara-negara ASEAN(Beckman, 2017)

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pembangunan pulau buatan Tiongkok ini. Pada penelitian pertama, adalah jurnal milik Hwon Lee tahun 2023 dengan judul "*The Legality of Militarization of the South China Sea and Its Legal Implications*". Pada jurnal ini membahas mengenai legalitas militerisasi yang dilakukan Tiongkok pada pulau buatan di Kepulauan Spratly. Pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas mengenai militerisasi pulau buatan seperti pembangunan pangkalan militer, penggunaan kekuatan milisi maritim, dll. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perspektif yang digunakan, dimana Lee membahas isu ini melalui kacamata hukum internasional lengkap dengan analisis sesuai pasal-pasal. Penelitian yang

ditulis penulis dibahas melalui kaca mata Hubungan Internasional khususnya strategi geopolitik (Lee, 2023)

Lalu penelitian kedua adalah jurnalmilik Sadia Afrin tahun 2017 yang berjudul "*The Construction of China's Artificial Island in the South China Sea: The Failure of the UNCLOS*". Penelitian ini membahas mengenai pembangunan pulau-pulau buatan di kepulauan Spratly yang memang dapat memicu konflik kedaulatan nasional, keamanan maritim, dan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam. Reklamasi ini memang dapat memicu konflik kedaulatan nasional, keamanan maritim, dan pemanfaatan dll. Reklamasi yang didukung militerisasi ini meningkatkan ketegangan dan hal ini merupakan bukti kegagalan UNCLOS dalam menyelesaikan kasus ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai alasan reklamasi, sejarah klaim, dll. Perbedaannya ada pada respon AS. Penelitian ini fokus pada *international rule-based order* milik AS yaitu UNCLOS dan pada penelitian ini juga menjelaskan secara detail dan lengkap respon AS (Afrin, 2017).

Penelitian ketiga adalah milik Try Satria Indrawan Putra dan kawan-kawan tahun 2016 dengan Judul "*Reklamasi Pulau Republik Rakyat Tiongkok Di Laut Cina Selatan: Suatu Analisis Terhadap Status Penambahan Wilayah Dan Dampak Terhadap Jalur Pelayaran Internasional*". Jurnal ini membahas mengenai Reklamasi dan dampaknya pada jalur pelayaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas mengenai reklamasi pulau. Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis penulis adalah fokusnya pada Hukum Internasional UNCLOS lengkap dengan pasalnya dan dampaknya pada pelayaran internasional bila tidak ditangani dengan baik reklamasi ini akan melanggar Kebebasan berlayar dan

hak lintas damai adalah hak yang dimiliki oleh setiap negara (Putra et al., 2016)

Dengan demikian tulisan ini bukan tulisan yang pertama membahas mengenai reklamasi pulau buatan Tiongkok di kepulauan Spratly dan upaya militerisasinya, namun kebaruan pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang memengaruhi reklamasi tersebut bila dilihat dari kacamata Geopolitik. Serta proses reklamasi yang terfokus pada tiga pulau utama. Maka jurnal ini akan menjelaskan tentang **bagaimana Strategi Tiongkok dalam pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly**

Kerangka Teori

Pada tulisan ini, penulis menggunakan teori Sea control atau kontrol laut untuk meneliti strategi yang digunakan Tiongkok dalam reklamasi pulau buatan di Laut China Selatan khususnya di kepulauan Spratly. Sea control, adalah kemampuan suatu negara untuk mengendalikan dan menguasai wilayah laut, sehingga dapat memastikan keselamatan dan keamanan penggunaan laut oleh negara sendiri, serta mencegah lawan menggunakan laut. sea control melibatkan kemampuan suatu negara untuk menguasai dan mengendalikan laut, serta mencegah lawan menggunakannya. Dengan demikian, negara yang memiliki sea control dapat memastikan keselamatan penggunaan laut, menghambat gerakan lawan, dan mempertahankan kepentingan strategisnya di laut (Vego, 2016)

Sea Control ini merupakan pandangan yang berorientasi pada angkatan laut dalam mengoperasikan strategi suatu negara. Laut dalam hal ini dimaknai sebagai medan perang yang harus dilindungi, hal itu karena 70 persen

wilayah di muka bumi adalah laut, sehingga menyimpan berbagai kekayaan. Samudra/laut berfungsi sebagai dasar untuk penggunaan kekuatan angkatan laut seseorang terhadap pantai dan di kedalaman wilayah musuh. Laut adalah area yang memungkinkan penyebaran dan pelestarian bagian dari potensi militer seseorang. Laut juga berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang digunakan untuk pergerakan bebas ekonomi dan barang militer 7. Dalam hal ini, Laut dapat dikatakan mendorong aktivitas militer (Vego, 2016)

Laut menjadi wilayah yang spesial karena dalam konteks perang, laut memiliki tantangan yang berbeda dengan daratan. Tentara AD biasanya dapat mengendalikan wilayah yang didudukinya. Sebaliknya, armada laut tidak dapat tetap berada di lautan/area laut di mana ia mengalahkan armada musuh. Pada masa lalu, istilah Sea Control lebih sering dikenal dengan Command of the Sea. Konsep Command of the Sea atau komando laut ada ketika satu pihak mengamankan arus pelayarannya, memotong lalu lintas maritim musuh, dan, jika perlu, memproyeksikan kekuatan ke pantai musuh(Vego, 2016).

Awalnya, Komando laut berarti memiliki kendali penuh atas komunikasi maritim, yang mencakup pergerakan kapal dan aliran barang serta informasi di laut. Tujuan ini penting baik untuk kepentingan komersial (misalnya, perdagangan dan pengiriman barang) maupun untuk kepentingan militer (misalnya, mobilisasi pasukan dan logistik militer). Sementara di darat, kemenangan biasanya diukur dengan penaklukan wilayah dan penguasaan teritori fisik. Di laut, kemenangan lebih diukur dengan kemampuan untuk mengontrol jalur komunikasi maritim, yang memungkinkan negara atau kekuatan militer menguasai perdagangan, transportasi, dan pergerakan strategis lainnya di lautan. (Vego, 2016)

Namun dalam perang antara dua negara kuat, tidak ada yang namanya komando laut yang lengkap atau penuh. Lalu pasca perang dunia, istilah Command of The Sea atau komando laut berganti menjadi Sea Control. Hal ini karena istilah komando memproyeksikan kekuatan yang absolut. Karena sejatinya, laut tidak dapat dikomando secara penuh tapi masih bisa dikontrol. Sea Control ini juga sering digunakan oleh Admiral Alfred T. Mahan. (Vego, 2016)

Hal ini menjelaskan bahwa Sea Control atau kontrol laut ini tidak bersifat mutlak. Diantara kedua pihak yang kuat, tidak mungkin salah satunya menguasai laut, dan pihak yang lain tidak bisa memakai sama sekali jalur laut tersebut. Kontrol Laut terbatas pada ruang dan waktu. Hal ini juga menjelaskan bahwa kontrol laut memiliki makna yang sederhana juga rumit. Sederhananya, kontrol laut berarti kemampuan suatu pihak untuk menggunakan bagian dari laut dan udara di atasnya untuk tujuan militer dan non-militer, serta mencegah musuh menggunakan bagian yang sama pada saat konflik. Kontrol laut bukanlah dominasi total, melainkan penguasaan yang cukup untuk mengamankan kepentingan penggunaan laut dan mencegah gangguan signifikan dari pihak musuh (Vego, 2016)

Di masa lalu, komando laut sepenuhnya mengacu pada kontrol komunikasi laut, yaitu tujuan ekonomi-militer. Akan tetapi, jika dipahami dengan benar saat ini, kontrol laut selalu tidak hanya memiliki tujuan ekonomi dan militer tetapi juga politik dan bahkan tujuan psikologis. Di antaranya, kontrol laut memfasilitasi pertahanan dan perlindungan lalu lintas maritim yang bersahabat dan menolak hal yang sama kepada musuh (Vego, 2016)

Pentingnya kontrol laut tergantung pada posisi geostrategis suatu negara. Secara Teori, kontrol laut dibagi menjadi tiga skala. Strategis dimana

kontrol ini berhubungan dengan seluruh wilayah maritim, dengan skala dan cakupan yang luas. Lalu kontrol laut operasional, yang mana kontrol ini Fokus pada area tertentu yang lebih kecil dan lebih spesifik dibandingkan dengan skala strategis, lalu kontrol laut taktis, dimana kontrol ini berhubungan dengan pengendalian wilayah laut yang lebih kecil, seperti sektor tempur angkatan laut atau daerah operasi maritim tertentu. Yang mana fokus nya ada pada operasi militer untuk tujuan tertentu. Dengan begitu, pengendalian pada level ini lebih memengaruhi keberhasilan keseluruhan dalam konflik atau operasi maritim (Vego, 2016)

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada ilmu pengetahuan sosial dan bergantung pada fenomena sosial berdasarkan pengamatan manusia. Karena fokusnya adalah fenomena sosial yang didominasi oleh perilaku manusia, penelitian kualitatif secara garis besar tidak memerlukan perhitungan, meskipun masih ada beberapa perhitungan yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil dari penelitian kualitatif berbentuk data deskripsi yang menjelaskan mengenai tingkah laku manusia baik individu atau kelompok berdasarkan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2008; Syalim & Syahrums, 2012).

Studi dokumen dan studi kasus digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penulisan jurnal ini. Sebagai bahan analisis, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang tersebar di internet. Dokumen sekunder yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dokumen yang dikumpulkan dari studi atau penelitian kepustakaan lainnya.

Selain itu, penulis menganalisis dokumen tersebut untuk studi kasus di kawasan dengan menggunakan teori tertentu (Moleong, 2006).

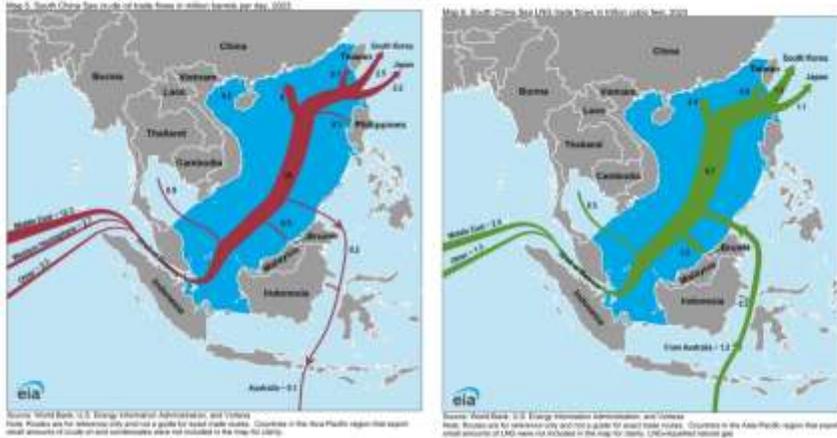
Hasil dan Pembahasan

Penjelasan umum reklamasi pulau buatan di Kepulauan Spratly (Physical Features Laut China Selatan)

Reklamasi dan militerisasi pulau-pulau buatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan klaimnya di LCS, dengan adanya pangkalan militer Tiongkok di pulau-pulau buatan tersebut, Tiongkok bertujuan menciptakan kontrol laut atas LCS. Selain itu, posisinya di LCS juga didasari oleh pertimbangan ekonomi. Seperti yang kita tahu, Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Banyak kapal-kapal bisnis yang melintas di lautan tersebut.

Menurut The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 80 persen perdagangan global berdasarkan volume dan 70 persen berdasarkan nilai, perdagangan diangkut melalui jalur laut. Lalu dari volume tersebut, 60 persen perdagangan maritim melewati Asia, dengan Laut China Selatan membawa sekitar sepertiga dari pengiriman global. (CSIS, 2016) Perdagangan ini didominasi oleh perdagangan minyak dan gas. Pada tahun 2023, 76 juta barel per hari (b/d) minyak bumi dan produk minyak bumi dikirim secara global melalui transportasi laut. Sekitar 28 juta b/d (37%) dari jumlah tersebut pengiriman tersebut melintasi Laut China Selatan. Sebagian besar perdagangan maritim melalui Laut China Selatan melewati Selat Malaka, Sunda, dan Lombok. Laut China Selatan juga tidak hanya menjadi jalur perdagangan bagi negara-negara Asia tetapi juga kawasan lain seperti Timur Tengah. Lebih dari setengah pengiriman minyak bumi dan produk

minyak bumi yang melalui Laut Cina Selatan berasal dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, UEA, dan Irak. (EIA, 2024)



Sumber : (EIA, 2024)

LCS juga menyimpan banyak sumber daya alam (SDA). Dapat dipetakan bahwa SDA di LCS terbagi menjadi SDA Minyak dan Gas dan Perikanan. Menurut data Rystad Energy 2023, LCS menyimpan sekitar 3,6 miliar barel cadangan minyak bumi dan cairan lainnya serta 40,3 triliun kaki kubik cadangan gas alam (EIA, 2024) Sementara untuk data sumber daya perikanan LCS berkontribusi sebagai penyumbang perikanan global sebesar 12% pada tahun 2016. (Sumaila et al., 2021) yang mana dalam hal ini LCS menjadikan LCS sebagai daerah penangkapan ikan yang paling penting di Pasifik Barat.

Tiongkok mereklamasi dengan dasar dari berbagai Sumber Daya di Laut Cina Selatan. Seperti yang diketahui Tiongkok mereklamasi tujuh pulau dalam kurun waktu dua tahun yaitu dari tahun 2014-2016. Selain itu, tiga diantara pulau-pulau tersebut sudah difasilitasi dengan fasilitas militer. Ketiga

pulau tersebut adalah Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef. Ketiga pulau tersebut pun sudah memiliki fasilitas militer yang kompleks dan terintegrasi satu sama lain. Pertama di Mischief Reef. Pendudukan Tiongkok di Mischief Reef dimulai sekitar tahun 1994-an. Hal itu membuat pemerintah Filipina melakukan protes pada tahun 1994 sebelum pembangunan Mischief Reef dimulai. Mischief Reef sendiri hanya berjarak 129 mil laut (239 km) dari pulau Palawan di Filipina, yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Filipina berdasarkan UNCLOS. Pulau Hainan di daratan Tiongkok berjarak 599 mil laut (1.109 km). Sebelum konstruksi dimulai, hanya sedikit atau bahkan tidak ada daratan di Mischief Reef yang tetap berada di atas udara secara permanen. Namun, reklamasi yang berkelanjutan telah menghasilkan lebih dari 5 km persegi daratan permanen. Menurut Institut Transparansi Maritim Asia, mulut karang yang lebar menunjukkan keinginan Tiongkok untuk menggunakan Mischief Reef sebagai fasilitas militer besar untuk melengkapi kemampuan angkatan udara yang telah dibangun di Fiery Cross Reef. Total yang direklamasi adalah 5.580.000 meter persegi pada akhir pembangunan tahun 2016 (SCMP, 2016).

Reklamasi di pulau ini juga disusul dengan pembangunan infrastruktur militer sama seperti di kedua pulau lainnya. Fasilitas Mischief Reef dalam bidang komunikasi nya berupa Satelit Komunikasi seperti stasiun komunikasi. Kedua, komunikasi antar pulau berupa menara seluler. Ketiga, komunikasi tingkat tinggi seperti HF Array Antenna. Kemudian fasilitas pertahanan berupa radar seperti radar pengendali lalu lintas udara. Sedangkan pada fasilitas pertempuran berupa Electronic Warfare seperti Suspected ELINT Array Utara. Kedua, Offensive-Defensive Strike seperti fasilitas misil permukaan ke udara. Untuk menunjang pertempuran pulau ini juga memiliki generator pembangkit listrik tenaga diesel. (Dahm, 2020)



Sumber: (CSIS AMTI, 2020b)

Lalu di Subi Reef. Reklamasi ini diawali oleh Pendudukan Tiongkok di Subi Reef yang dimulai pada tahun 1988. Pada awalnya, Subi Reef adalah sebuah pulau karang yang tidak berpenghuni. Tiongkok mulai melakukan reklamasi di pulau ini pada tahun 1990-an berupa penimbunan terumbu karang oleh pasir. Proses reklamasi awal dilakukan sedikit demi sedikit sehingga memakan waktu yang cukup lama. Hingga pada 2014-an Tiongkok mulai membangun fasilitas militer di atas pulau buataannya ini (Sudrajat, 2022)

Sejak itu, itu telah menjadi lokasi terdepan paling utara dari kelompok Pulau Spratly. Terumbu karang ini akan terendam saat air pasang dalam keadaan alaminya, tetapi karena pembangunan, terumbu karang ini telah diubah menjadi instalasi militer permanen. Militer Filipina tinggal di gugusan Karang Thitu, 14 km dari terumbu karang ini. Total luas area yang direklamasi pada saat selesai di 2016 adalah 3.950.000 meter persegi. (SCMP, 2016)

Pasca reklamasi, Subi Reef juga dilengkapi fasilitas militer. Pada pulau Subi Reef terdapat fasilitas militer yang menunjang komunikasi,

pertahanan, dan pertempuran. Untuk fasilitas komunikasi pulau ini memiliki Satelit Komunikasi (SATKOM) berupa stasiun komunikasi. Kedua, Komunikasi tingkat tinggi, seperti HF Monopole Array. Ketiga, Komunikasi antar pulau, contohnya Troposcatter Station yang menghubungkan ke kedua pulau. Kemudian fasilitas pertahanan berupa radar, contohnya Over the Horizon Radar North dan radar udara. Kedua Electronic Intelligence (ELINT) contohnya seperti Mobile system deployment area. Sedangkan pada fasilitas untuk pertempuran berupa penyerang Offensive-Defensive, contohnya 24 Fighter Aircraft Hangars dan peluncur misil. Kedua, untuk menunjang pertempuran pulau ini juga memiliki generator bertenaga diesel dan penyimpanan air serta minyak(Dahm, 2020)

Menurut laporan dari Asia Maritime Initiative (AMTI) yang bernaung di bawah institusi Center for Strategic and International Studies. yang berbasis di Washington DC, telah terindikasi bahwa Subi Reef merupakan rumah bagi sejumlah bangunan penting, termasuk mercusuar besar, lima hanggar dengan kapasitas masing-masing untuk menampung 20 pesawat tempur, dan lapangan terbang dengan panjang lebih dari 3.000 meter, yang telah selesai dibangun pada awal tahun 2016, yang mana fasilitas tersebut dapat digunakan untuk menunjang pertempuran (Sudrajat, 2022)



Sumber: (CSIS AMTI, 2020c)

Lalu Fiery Cross Reef. Pada tahun 1988, Tiongkok menduduki daratan Fiery Cross Reef berdasarkan piagam pembangunan stasiun cuaca untuk PBB. Para ilmuwan kemudian mengakui bahwa tidak ada pembangunan wilayah di wilayah tersebut. Pulau ini telah berkembang menjadi hampir 3 km persegi dari daratan alaminya yang kurang dari 10.000 meter persegi. Salah satu fitur maritim paling terpencil di Kepulauan Spratly yang diduduki Beijing adalah Fiery Cross Reef, yang dikerjakan tanpa pengawasan yang ketat. Fasilitas baru ini memiliki landasan udara sepanjang 3,1 km, yang cukup panjang untuk pesawat militer Tiongkok mendarat. Beijing juga mulai membangun pelabuhan yang dapat menampung kapal tanker militer. Total luas area yang direklamasi pada 2016 adalah 2.740.000 meter persegi. (SCMP, 2016)

Setelah fasilitas nya berkembang, Pada pulau Fiery Cross Reef terdapat beberapa fasilitas militer yang menunjang komunikasi, pertahanan, dan pertempuran. Untuk fasilitas komunikasi pulau ini memiliki Satelit Komunikasi (SATKOM) berupa stasiun komunikasi. Kedua, Komunikasi

tingkat tinggi, seperti HF Monopole Array. Ketiga, Komunikasi antar pulau, contohnya Troposcatter Station North yang menghubungkan ke Subi Reef. Kemudian fasilitas pertahanan berupa radar, contohnya Over the Horizon Radar North. Kedua Electronic Intelligence (ELINT) contohnya seperti Probable ELINT Array North. Sedangkan pada fasilitas untuk pertempuran berupa penyerang Offensive-Defensive, contohnya 24 Fighter Aircraft Hangars. Kedua, untuk menunjang pertempuran pulau ini juga memiliki generator bertenaga diesel dan penyimpanan minyak serta air. Selain itu, di Fiery Cross Reef, Tiongkok juga memiliki sistem rudal hanud HQ-9B, memiliki radius pertahanan dari target pesawat tempur, drone militer, dan rudal jelajah sejauh 160 mil laut. Lalu pulau ini juga dilengkapi oleh landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang menunjang aktivitas angkatan udaranya (Dahm, 2020)

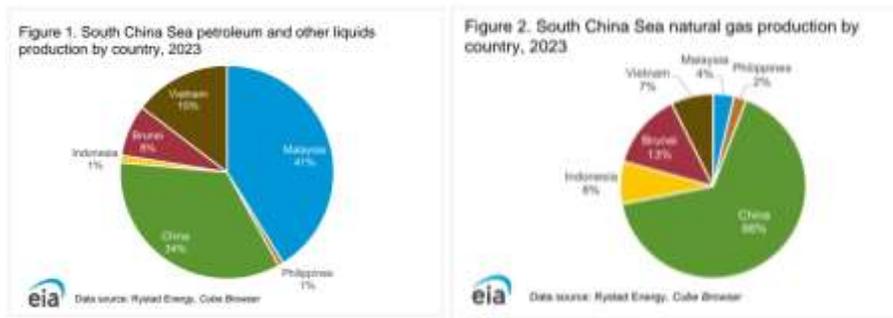


Sumber: (CSIS AMTI, 2020a)

Analisis strategi Tiongkok dalam membangun pulau buatan di Kepulauan Spratly (Political Behaviour dan Implikasi Regional)

Dari Physical Feature LCS tersebut memengaruhi kebijakan politik Tiongkok atas LCS. menunjukkan bahwa LCS memang penting khususnya bagi negara negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan. Tiongkok

Hal ini menjelaskan bahwa Tiongkok sudah mengeksplorasi SDA yang lebih banyak daripada negara-negara lain yang bersengketa di LCS. Tingginya eksplorasi SDA minyak dan gas alam ini membuat Produksi gas alam dan minyak Tiongkok telah meningkat sejak tahun 2018. Perusahaan minyak Tiongkok seperti, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), dan China National Petroleum Corporation (CNPC) adalah keuntungan dari pengembangan sumber daya Laut Cina Selatan. Pada tahun 2023, Tiongkok memproduksi 410.000 barrel cairan minyak bumi dan 489 Bcf gas alam dari Laut Cina Selatan, menurut Rystad (EIA, 2024)



Sumber : (EIA, 2024)

Dari keuntungan yang di dapat Tiongkok dari LCS ini, dapat dianalisis bahwa hal ini membuat Tiongkok melakukan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensinya di Laut China Selatan agar terus meraih keuntungan tersebut. Reklamasi dan militerisasi pulau-pulau buatan di Laut China Selatan khususnya di kepulauan Spratly menjadi salah satu upaya Tiongkok untuk mempertahankan eksistensi dan kontrolnya agar Tiongkok dapat mengamankan kepentingan ekonominya melalui perairan tersebut.

Hal tersebut juga menjadi fokus Tiongkok karena LCS merupakan wilayah yang diperebutkan juga dengan AS. Keuntungan posisi geografis yang strategis LCS juga dilihat dari banyaknya upaya Amerika Serikat untuk ikut mengamankan kepentingannya di perairan tersebut. AS beberapa kali mengakomodir upaya untuk mencegah Tiongkok mengontrol LCS, seperti latihan militer dengan Filipina di sekitar kepulauan Spratly, atau menunjukkan eksistensi angkatan laut AS di sekitar kepulauan Spratly.

Menurut analisis peneliti, apabila LCS berhasil dikontrol oleh AS maka Tiongkok akan kesusahan untuk mengakses laut tersebut mengingat bagaimana rivalitas kedua negara dalam beberapa aspek. Kesulitan akses jalur pelayaran tersebut akan membawa dampak buruk pada ekonomi Tiongkok, yang berujung matinya ekonomi Tiongkok karena semua perekonomiannya yang bergantung kepada LCS.

Maka dengan ini, Tiongkok membangun pulau buatan dan memiliterisasi tiga dari tujuh pulau yang sudah direklamasi. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai Gray Zone Tactic yang dilakukan Tiongkok di LCS. Gray Zone Tactics mengacu pada tindakan yang diambil oleh aktor negara dan non-negara yang berada di antara batas-batas tradisional perdamaian dan perang. Taktik ini bertujuan untuk mencapai tujuan strategis tanpa melewati ambang batas konflik bersenjata, sering kali menggunakan tindakan koersif untuk menekan negara atau aktor lain agar mematuhi kepentingan mereka. (EIA, 2024; Robertson, 2022)

Taktik daerah abu-abu berbeda dengan konflik konvensional karena mereka bertahap (gradual), revisi, dan ambigu. Mereka juga sering menggunakan alat atau upaya non-konvensional dan tidak selalu melibatkan demonstrasi kekuatan militer. Secara teknis taktik zona abu-abu

menempatkan sesuatu di masa antara damai dan perang. Upaya-upaya yang dilakukan cenderung ambigu dan bertahap, seperti penggunaan komponen paramiliter atau non-militer, misinformasi, dan operasi siber (Agastia et al., 2020)

Taktik ini melibatkan tindakan Tiongkok yang tidak termasuk dalam agresi langsung, tetapi masih menantang status quo dan menegaskan klaimnya di wilayah tersebut. Tiga pulau buatan terbesar Mischief Reef, Fieri Cross Reef, dan Subi Reef menciptakan posisi pertahanan segitiga terhadap pangkalan AS di Filipina. Strategi zona abu-abu ini dalam konteks keamanan laut dan geopolitik Asia Tenggara adalah penggunaan kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menekan targetnya, termasuk negara-negara di Indo-Pasifik namun tidak secara koersif. Strategi ini melibatkan berbagai taktik militer, seperti udara, maritim, dan darat, yang digunakan oleh beberapa dinas militer Tiongkok. Taktik ini bukan hanya sejak reklamasi pulau dan pembangunan fasilitas militer, tetapi sejak Tiongkok menetapkan untuk menduduki pulau-pulau tersebut. Taktik ini dilakukan sejak Tiongkok menduduki Subi reef dari 1988, dan pulau lainnya di Kepulauan Spratly setelahnya hingga pada saat ini dimana Tiongkok sudah memiliterisasi (Tatad et al., 2020)

Pembangunan fasilitas militer yang kompleks dan terintegrasi di pulau-pulau buatan di kepulauan Spratly merupakan taktik Tiongkok untuk mengamankan Kawasan Laut China Selatan. Selain itu, peningkatan aktivitas militer yang didorong oleh PLA dan milisi maritim juga merupakan bentuk penggunaan kekuatan militer sebagai penekan aktor-aktor di kawasan. (Ngamal, 2022)

Gagasan di balik Gray Zone Tactics melalui operasi milisi Tiongkok ini juga untuk menggunakan otoritas atas ruang maritim menggunakan kapal dan personel sipil, tetapi melakukannya di acara yang menghalangi konfrontasi militer terbuka. <https://penerbitpelita.com/taktik-zona-abu-abu-china>. Dalam hal ini, Tiongkok memanfaatkan penggunaan komponen non-militer dan paramiliter untuk beroperasi di daerah abu-abu. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan nelayan sipil. Strategi maritim Tiongkok di Laut China Selatan bergantung pada MMT. Strategi ini merupakan pengembangan dari gagasan "perang rakyat" di laut. Dengan menggunakan kapal nelayan sipil, Tiongkok dapat mempertahankan hak atas wilayah perairan yang kaya sumber daya laut dan memenuhi kebutuhan pangan dan ekonominya (Agastia et al., 2020).

Selain dengan pembangunan fasilitas militer, Tiongkok juga melakukan aktivitas militer yang didukung oleh PLA dan Milisi Maritim. Aktivitas PLA di Kepulauan tersebut tidak hanya dilakukan oleh angkatan laut, melainkan juga angkatan udara, hal tersebut dapat dibuktikan dengan eksistensi pesawat militer, Shaanxi Y-8, yang dikerahkan ke pangkalan Tiongkok di Subi Reef di Kepulauan Spratly. Pesawat Y-8 dirancang sebagai pesawat angkut militer, tetapi beberapa varian digunakan untuk patroli maritim atau sinyal intelijen. Selain itu Pesawat serupa juga mendarat di Fiery Cross Reef pada bulan April 2016 untuk mengevakuasi tiga personel yang jatuh sakit. Lalu dua pesawat angkut militer Xian Y-7 di Mischief Reef. Tiongkok telah mengerahkan rudal jelajah anti-kapal YJ-12 B dan sistem rudal permukaan-ke-udara HQ-9B di setiap terumbu karang sebagai bagian dari latihan militer. (CSIS AMTI, 2018)

Tiongkok menggunakan Milisi Maritim nya di kepulauan Spratly. Milisi maritim merupakan komponen paramiliter yang kerap digunakan Tiongkok khususnya dalam isu LCS. Dalam susunan organisasi militer Tiongkok, Milisi

Maritim Tiongkok (selanjutnya disingkat MMT) dibawah oleh Angkatan Laut Tiongkok (People's Liberation Army-Navy) dan Penjaga Pantai Tiongkok (China Coast Guard). (Agastia et al., 2020)

Milisi Maritim, dipimpin oleh Dewan Negara dan Komisi Militer Pusat, dan terdiri dari kapal nelayan yang telah didaftarkan khusus dan diawasi oleh nelayan yang juga dilatih sebagai prajurit. Di wilayah pesisir, pemerintah lokal dan militer telah membentuk kapal Milisi Maritim, yang terdiri dari Pemerintah lokal Departemen PLA mengatur dan melatih milisi di tingkat distrik militer provinsi dan sub-distrik. Departemen Mobilisasi Staf Umum PLA bertanggung jawab untuk mengawasi dan menetapkan peraturan untuk pekerjaan milisi di seluruh negeri. Pemerintahan lokal dan kekuatan militer diatur oleh Komite Mobilisasi Pertahanan Nasional. (Pramadiansyah, 2022; Yamaguchi, 2016)

Penggunaan Milisi Maritim untuk menegaskan klaim di perairan yang disengketakan sudah dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spratly sejak tahun 1988. Aktivitas milisi ini kian meningkat dan mulai melakukan operasi intens pada tahun 2000-an. Lalu pada tahun 2016, kapal-kapal milisi maritim Tiongkok ini mulai dikerahkan ke Kepulauan Spratly, yang mana pada tahun 2016 tersebut Tiongkok baru saja menyelesaikan Reklamasi pulau buatan. (Poling et al., 2022)

Pada praktiknya Milisi Maritim merupakan komponen utama dari Partai Komunis Tiongkok, dalam hal ini, milisi maritim beraktivitas seolah-olah terlibat dalam penangkapan ikan komersial tetapi pada realitanya mereka bekerja sama engan aparat penegak hukum dan kekuatan militer. Hal ini menunjukkan bahwa Milisi Maritim memainkan peran penting dalam strategi militer Tiongkok, baik dalam fungsi pendukung maupun operasional. Misi

mereka meliputi dukungan logistik militer, pengintaian, dan partisipasi dalam pertempuran (Poling et al., 2022).

Keterlibatan Milisi Maritim dapat dibuktikan dengan informasi bahwa Tiongkok menggunakan milisi maritim untuk menegaskan klaim di Laut China Selatan (LCS). Beijing mendanai ratusan kapal yang digunakannya untuk mendukung klaim ekspansinya di perairan yang disengketakan. (Wirawan, 2021)

Menurut penelitian baru dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Amerika Serikat, terdapat kurang lebih 300 kapal-kapal milisi yang dibuat khusus dan armada penangkapan ikan komersial yang mana kapal milisi maritim Tiongkok tersebut berpatroli di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan pada satu waktu ketika Beijing terus mempertaruhkan klaim kontroversialnya di perairan yang disengketakan. (Wirawan, 2021) . Kapal milisi maritim Tiongkok yang beroperasi tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu ; Kapal Penangkap ikan Milisi Maritim profesional (Maritime Militia Fishing Vessel) dan Kapal penangkap ikan tulang punggung Spratly (Spratly Backbone Fishing Vessel). MMFV dirancang untuk menunjang seluruh operasi milisi maritim, sementara SBFV merupakan kapal yang secara khusus beroperasi di kepulauan Spratly untuk memenuhi tujuan politik Tiongkok. (Poling et al., 2022)

Menurut analisis, yang dilakukan Tiongkok di pulau-pulau buatan tersebut tidak merupakan perang langsung, tetapi juga tidak damai. Tiongkok memiliterisasi pulau-pulau tersebut dan menjadikan pulau tersebut pangkalan militer di area Laut China Selatan. Namun, dari beberapa aktivitas militer tersebut memang tidak ada indikator Tiongkok akan melakukan penyerangan, posisinya di Pulau-pulau buatan tersebut dapat dikatakan hanya sebatas

pertahanan. Di satu sisi, aktivitas Tiongkok ini juga tidak menunjukkan posisi damai, Tiongkok tidak menarik semua pasukannya dari LCS. Maka hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai gray zone tactics atau taktik zona abu-abu tersebut.

Gray Zone tactics yang sifatnya ambigu ini dilakukan dengan tujuan menekan tetapi tidak menciptakan konflik terbuka di kawasan. Hal ini terjadi apabila Tiongkok terlalu agresif hingga menunjukkan tanda tanda perang, hal itu akan memancing Amerika Serikat dan sekutunya untuk ikut menapaki eksistensi di LCS. Potensi perang terbuka juga jadi lebih besar. Hal itu tidak dilakukan Tiongkok karena, sebagai negara yang sedang bangkit juga secara ekonomi, perang sangat menguras ekonomi suatu negara, dan alih-alih melakukan itu Tiongkok lebih memilih gray zone tactic melalui upaya reklamasi pulau buatan ini sebagai strategi penegasan klaim di LCS.

Kesimpulan

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa secara Geografis Laut China Selatan memiliki keunggulan dari segi jalur pelayaran dunia hingga kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Hal ini membuat banyak negara yang ingin menguasai Laut China Selatan, tak terkecuali Tiongkok. Klaim Tiongkok di LCS sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu yang mana klaimnya berdasarkan sejarah dan kebiasaan masa lalu. Klaim tersebut juga diperkuat dengan adanya reklamasi pulau buatan di Kepulauan Spratly yang didukung oleh fasilitas militer. Reklamasi dan militerisasinya tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk menegaskan Laut China Selatan. Dari hasil reklamasi tersebut sudah terdapat 7 pulau buatan dengan 3 diantaranya berhasil di militerisasi. Militerisasi ini juga termasuk patrol laut yang melibatkan *People Liberation Army* (PLA) dan Milisi Maritim.

Faktor Reklamasi dan Militerisasi pulau buatan ini juga dapat ditinjau dari segi geografis yang berimplikasi pada politik dalam negeri Tiongkok. Kekayaan alam berupa Minyak dan Gas merupakan faktor utama, lalu faktor kedua adalah fakta bahwa LCS merupakan jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang sibuk. Hal tersebut berimplikasi pada politik Tiongkok dimana Tiongkok ingin menunjukkan kekuatan di Laut tersebut. Selain itu, fakta bahwa Laut China Selatan adalah jalur laut satu-satunya Tiongkok untuk mendukung perekonomiannya membuat Tiongkok melakukan berbagai cara untuk mengamankan kepentingannya.

Reklamasi dan militerisasi yang dilakukan ini juga merupakan taktik zona abu-abu dimana Tiongkok memposisikan berada antara Perang dan damai. Penggunaan kekuatan paramiliter yang ambigu dan bertahap juga merupakan bagian dari taktik zona abu-abu ini. Taktik tersebut dilakukan agar Tiongkok bisa mengontrol dan menguasai Laut China Selatan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya yang fokusnya pada ekonomi.

Referensi

- Afrin, S. (2017). The Construction of China's Artificial Island in the South China Sea : The Failure of the UNCLOS. *Journal of Conflict and Integration*, 1(2), 66–97. <https://doi.org/10.26691/jci.2017.12.1.2.66>
- Agastia, D., Dermawan, R., Nur Rohma, M., Alexandra, F., Inas Pratiwi, F., Aznor, A., & Hardi Alunaza, S. (2020). *Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok dan Operasi Daerah Abu-abu (Grey Zone Operations) di Laut Cina Selatan*.
- Beckman, R. (2017). *China's "Island-Building" in the South China Sea: Implications for Regional Security*. <https://about.jstor.org/terms>
- CNN. (2022, March 21). *AS Tuduh China Sulap 3 Pulau di Laut China Selatan Jadi Basis Militer*. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220321130801-113-774170/as-tuduh-china-sulap-3-pulau-di-laut-china-selatan-jadi-basis-militer/2>

- CSIS. (2016). *How Much Trade Transits the South China Sea?* CSIS China Power. <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>
- CSIS AMTI. (2018). *AN ACCOUNTING OF CHINA'S DEPLOYMENTS TO THE SPRATLY ISLANDS*. CSIS.
- CSIS AMTI. (2020a). *Fiery Cross Reef*. CSIS. <https://images.app.goo.gl/o37PPS9P3F1ZYi48A>
- CSIS AMTI. (2020b). *Mischief Reef*. CSIS. <https://images.app.goo.gl/Xe1r8CBzZ4H7U4jA7>
- CSIS AMTI. (2020c). *Subi Reef*. CSIS. <https://images.app.goo.gl/faj4nUPek4hwdNq4A>
- Dahm, J. M. (2020). *A Survey of Technologies and Capabilities on China's Military Outposts in the South China Sea Hardened Infrastructure, Counter-Reconnaissance, and Battlespace Environment Management*.
- Darmawan, A. Z. P. (2024). Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim Di Kepulauan Natuna. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 3(1).
- EIA. (2024). *Regional Analysis Brief: South China Sea*. www.eia.gov
- Lee, H. (2023). The Legality of Militarization of the South China Sea and Its Legal Implications. *KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54007/ijmaf.2023.15.1.1>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rodakara.
- Ngamal, Y. (2022, October 17). *'Taktik Zona Abu-Abu' China*. TP Publishing. <https://penerbitpelita.com/taktik-zona-abu-abu-china/>
- Poling, G. B., Mallory, T. G., & Prétat, H. (2022, December 16). *Analisis yang mengungkapkan milisi maritim TIONGKOK*. IPEF Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/id/2022/12/menyingskap-tabir/>
- Pramadiansyah, A. M. F. (2022). *Analisis Agresivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan terhadap Keamanan Regional Asia Tenggara (Studi Kasus: Negara-negara Asia Tenggara Pengklaim Laut China Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Pusparisa, Y. (2020). *Tiongkok Kuasai Ekspor Jalur Laut Cina Selatan*. Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/06/tiongkok-kuasai-ekspor-jalur-laut-cina-selatan>

- Putra, T. S. I., Samekto, F. X. A., & Hardiwinoto, S. (2016). Reklamasi Pulau Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan Suatu Analisis Terhadap Status Penambahan Wilayah Dan Dampak Terhadap Jalur Pelayaran Internasional. *Diponegoro Law*, 5(2).
- Robertson, A. (2022, July 18). *What is Grey Zone confrontation and why is it important?* The Cove. <https://cove.army.gov.au/article/what-grey-zone-confrontation-and-why-it-important>
- SCMP. (2016). *South China Morning Post*. South China Morning Post. <https://multimedia.scmp.com/2016/southChinaSea/explore.html>
- Sudrajat, I. (2022, May 12). *Tiongkok Terus Bangun Fasilitas di Subi Reef*. Koran Jakarta. <https://koran-jakarta.com/tiongkok-terus-bangun-fasilitas-di-subi-reef?page=all%20>.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaila, U. R., Cheung, W. W. L., & Teh, L. S. L. (2021). *Sink or Swim*.
- Syalim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir, Ed.). Citapustaka Media.
- Tatad, R., Paculba, X., & Despi, D. (2020). *Navigating China's Gray Zone Strategy in the South China Sea*. <https://www.researchgate.net/publication/349071289>
- The Guardian. (2022, March 21). *China has fully militarized three islands in South China Sea, US admiral says*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/21/china-has-fully-militarized-three-islands-in-south-china-sea-us-admiral-says>
- Vego, M. (2016). *Maritime Strategy and Sea Control Cass Series: Naval Policy and History*. Routledge.
- Wirawan, U. (2021, November 20). *Tiongkok Gunakan Milisi Maritim untuk Klaim Wilayah LCS*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/news/856387/tiongkok-gunakan-milisi-maritim-untuk-klaim-wilayah-lcs>
- Yamaguchi, S. (2016). Strategies of China's Maritime Actors in the South China Sea. *China Perspectives*, 2016(3), 23–31. <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.7022>